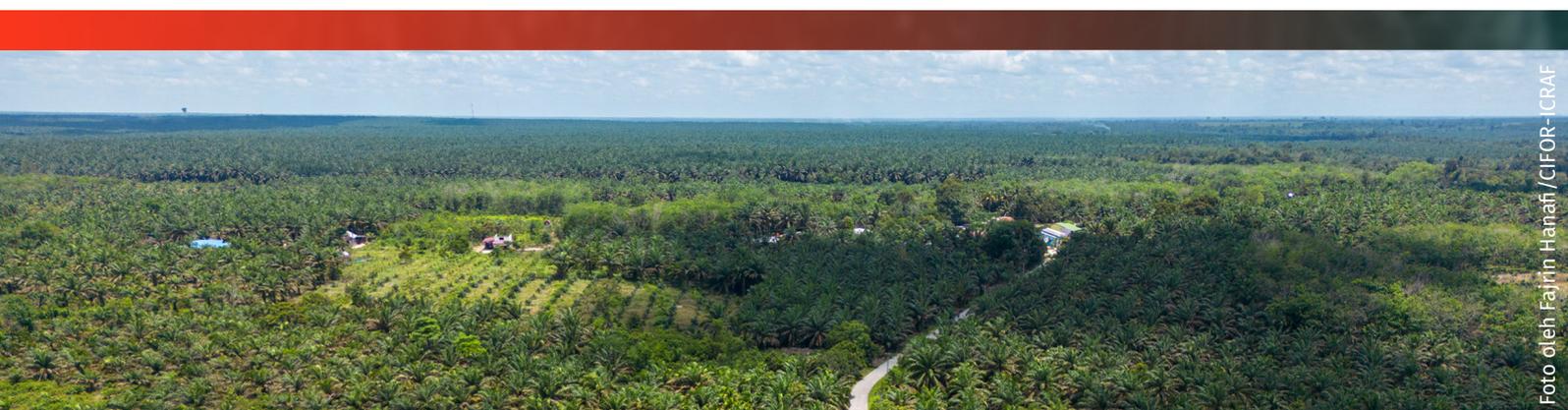




*Jikalahari*  
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau



Walmart  org



# Penguatan RAD KSB Menuju Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan

Dokumen ini adalah bagian dari penelitian “Perluasan Pendekatan Yurisdiksi pada Sektor Kelapa Sawit di Indonesia” yang dilaksanakan CIFOR-ICRAF dan Jikalahari di Kabupaten Pelalawan, dengan dukungan dari Walmart Foundation.

## Pendahuluan

Sebagai salah satu komoditas utama bagi Indonesia, kelapa sawit memegang peranan penting dalam perdagangan internasional maupun perindustrian. Kelapa sawit memberi kontribusi yang signifikan dan petani kelapa sawit memiliki peranan penting di dalamnya. Pengembangan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada laju deforestasi dan juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi gas rumah kaca, degradasi lahan, kebakaran hutan dan lahan, dan dampak lainnya.

Kelapa sawit juga memiliki relevansi dan implikasi besar bagi perempuan yang memungkinkan mereka berperan penting dalam proses budi daya dan pascapanen. Namun, ada berbagai tantangan gender di sektor ini, salah satunya adalah kurangnya keterwakilan perempuan dalam organisasi kelompok tani kelapa sawit. Sejumlah dorongan dan upaya telah dilakukan untuk mewujudkan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan dan inklusif, misalnya melalui sertifikasi maupun formulasi Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB dan RAD KSB).

Kuatnya keterkaitan lintas sektor pada kelapa sawit menyebabkan sinkronisasi dan kolaborasi antarsektor menjadi penting untuk membangun visi bersama guna mencapai keberlanjutan. Hal ini dimungkinkan dan didorong lewat pendekatan yurisdiksi (*jurisdictional approach*/JA) yang semakin dipandang sebagai jalan untuk mewujudkan transisi keberlanjutan. Salah satu contoh dari JA di sektor kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan ditunjukkan melalui proses multipihak dalam pengembangan RAD KSB.

Dokumen kontribusi ini merupakan bagian dari kegiatan riset yang memfasilitasi pengembangan visi bersama guna memperkuat inisiatif kelapa sawit berkelanjutan pada level yurisdiksi, terutama di Kabupaten Pelalawan. Dokumen ini berisi hasil analisis perdagangan, rantai pasok dan nilai, risiko dan deforestasi yang dilengkapi dengan penggunaan kerangka teori perubahan, teori tindakan, serta kerangka pemantauan dan evaluasi. Kami juga menyajikan pemodelan beragam skenario kebijakan terkait kelapa sawit berkelanjutan melalui JAPOS (*Jurisdictional Approach of Palm Oil Simulation*).

## Dinamika Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan serta Perkembangan Kelapa Sawit

Dari tahun 2000 sampai dengan 2019, Kabupaten Pelalawan telah kehilangan 80% hutan alamnya. Tren penurunan serupa juga terlihat pada hutan gambut yang ditunjukkan dengan hilangnya setengah hutan gambut di Kabupaten Pelalawan. Penurunan hutan gambut dan hutan alam ini menyisakan tutupan hutan alam dan hutan gambut sebesar 23% di tahun 2019. Sebagian besar hutan alam dan hutan gambut di Kabupaten Pelalawan berubah menjadi lahan pertanian, hutan tanaman, dan perkebunan kelapa sawit. Dalam kurun waktu 19 tahun terdapat kenaikan luasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. Hasil analisis menunjukkan, kelapa sawit dikembangkan di bagian barat daya kabupaten dan di dekat Taman Nasional Tesso Nilo. Hutan alam dan hutan gambut dikonversi menjadi lahan pertanian terlebih dahulu sebelum akhirnya dikonversi menjadi kebun kelapa sawit.

## Produksi Kelapa Sawit

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu dari tujuh kabupaten penting produsen kelapa sawit di Indonesia. Luasan area kelapa sawit yang terdaftar secara resmi pada tahun 2019 menurut data pemerintah kabupaten adalah 393.324 ha dengan sebagian besar (dua pertiga) dari kelapa sawit ini dimiliki oleh perusahaan. Produktivitas kebun perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan kebun yang dimiliki oleh pekebun rakyat, yakni 5,24 ton CPO (*crude palm oil*)/ha dibandingkan 3,96 ton CPO/ha. Total produksi CPO dari perusahaan dan petani mencapai 1,9 juta ton di tahun 2019.

## Perdagangan Kelapa Sawit

Sebagian besar (97%) dari CPO dan RPO (*refined palm oil*) yang diproduksi di Kabupaten Pelalawan ini ditujukan untuk pasar ekspor. Volume perdagangan kelapa sawit yang berasal dari Kabupaten Pelalawan menyumbang 2% dari total volume perdagangan nasional dengan nilai perdagangan sebesar US\$517 juta. Produksi kelapa sawit dari Kabupaten Pelalawan diekspor ke 120 negara, di antaranya adalah Asia Selatan, Cina, Amerika Serikat, Rusia, serta negara-negara lain di Eropa, Asia Tenggara, dan Afrika. Perdagangan internasional ini melibatkan enam perusahaan besar dan dua grup korporasi yang mendominasi lebih dari 50% volume perdagangan.

## Rantai Nilai dan Ketertelusuran Rantai Suplai

Sebanyak 77% produksi minyak sawit di Riau berasal dari perkebunan besar, sedangkan 23% berasal dari perkebunan rakyat. Produksi tandan buah sawit (*fresh fruit bunch/FFB*) dari kebun kelapa sawit di Pelalawan dipasok ke pabrik kelapa sawit (PKS) untuk diproses ke CPO. Sebanyak 67% minyak sawit diperdagangkan dalam bentuk RPO ke pasar ekspor, sedangkan 33%-nya dalam bentuk CPO ke pasar domestik dan ekspor. Sebagian besar rantai perdagangan di Pelalawan adalah dari kebun ke PKS dan banyak juga yang disuplai ke PKS di luar Pelalawan. Untuk *refinery*, suplai minyak sawit dari Pelalawan terpusat di Kota Dumai, Provinsi Riau. Meskipun tidak semua rantai perdagangan terjadi di Kabupaten Pelalawan, sarana dan prasarana di Provinsi Riau sudah terhubung dan mendukung pemasaran produksi dari Kabupaten Pelalawan. Beberapa korporasi besar masih mendominasi, baik untuk produksi maupun pemasaran minyak sawit dari Pelalawan menunjukkan dominasi tata kelola *directed network*. Dari segi ketertelusuran, hampir 97% rantai suplai minyak sawit dapat diidentifikasi afliasinya dengan data perdagangan dari grup perusahaan tertentu, dari *mill* sampai ke pasar. Namun, hanya 46%-nya yang terlacak sampai ke tingkat kebun. Hasil studi mencatat sebanyak 308 rantai suplai yang terlacak sampai ke tingkat kebun berasal dari 198 kebun di Kabupaten Pelalawan.

## Risiko dan Tantangan untuk Mencapai Kelapa Sawit Berkelanjutan

Berdasarkan kajian mengenai risiko hipotetis untuk mencapai kelapa sawit yang berkelanjutan, Kabupaten Pelalawan termasuk dalam kabupaten dengan skor risiko sedang (0,57 dari 1,00). Risiko hipotetis terbesar Kabupaten Pelalawan berasal dari tingginya persentase *mill* yang tidak tersertifikasi berkelanjutan dan risiko dari stagnasi pendekatan yurisdiksi di sektor sawit yang berkelanjutan. Di samping itu, para pemangku kepentingan mengidentifikasi beberapa permasalahan penting dalam diskusi. Permasalahan ini terkait dengan penguatan data, koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola dan penanganan sengketa; dan pelaksanaan sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), dan akses pasar produk-produk sawit.

## Aktor dan Jaringan Sosial Kelapa Sawit

Analisis aktor penting untuk mengetahui peta aktor dan konstelasi jaringannya untuk pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) dalam mendorong isu kelapa sawit berkelanjutan. Setidaknya ada 333 aktor yang membentuk 677 jaringan. Para aktor di tingkat Kabupaten Pelalawan ini memiliki keterkaitan dengan para aktor di Provinsi Riau maupun nasional. Beberapa aktor penting ini adalah pemerintah Kabupaten Pelalawan, pemerintah Provinsi Riau, UNDP (United Nations Development Programme), petani swadaya, Asian Agri, APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, dan Kementerian Pertanian (urutan tidak berdasarkan peringkat).

## Peranan Gender

Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mendukung upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender berdasarkan Keputusan Bupati No. 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Keputusan bupati ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 bahwa perempuan dan laki-laki harus menerima akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama atas pembangunan, baik yang direncanakan oleh pemerintah ataupun lembaga lainnya. Dari segi budaya, penduduk di Kabupaten Pelalawan terdiri atas beragam suku asli dan pendatang. Budaya patriarki yang dominan berlaku di Indonesia dan juga di Pelalawan; membatasi kesempatan para perempuan untuk didengar, dipertimbangkan, dan menempati posisi penting di masyarakat. Kondisi saat pandemi COVID-19 juga berdampak pada perubahan kondisi sosial yang dialami masyarakat termasuk di Pelalawan, yaitu para perempuan merasakan beban yang lebih berat dalam hal pekerjaan rumah dan perawatan anak. Beban kerja bagi perempuan Melayu tidak saja pada pekerjaan domestik rumah tangga, tetapi juga pekerjaan di luar rumah seperti berkebun atau bertani termasuk di perkebunan sawit.

## Dukungan Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Inisiatif sektor kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan ditunjukkan melalui RAD KSB Kabupaten Pelalawan yang dirumuskan melalui forum multipihak FOKSBI (Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) Kabupaten Pelalawan, yang saat ini disebut sebagai tim pelaksana daerah (TPD). RAD KSB ini disahkan melalui Keputusan Bupati No. 601 Tahun 2017 yang kemudian diratifikasi dalam Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2020 dan diselaraskan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RAD KSB ini berlaku dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dukungan untuk perkembangan sektor kelapa sawit juga ditunjukkan dalam misi kedua Bupati Pelalawan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang diterjemahkan ke dalam beragam program. Dukungan kebijakan lainnya juga diwujudkan melalui Peraturan Gubernur Riau No. 77 Tahun 2020 yang diperbarui melalui Peraturan Gubernur Riau No. 5 Tahun 2021 yang mengatur harga tandan buah sawit. Proses multipihak kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh pemerintah kabupaten, dengan dukungan para mitra, salah satunya UNDP. Di samping itu, proses pendekatan yurisdiksi juga didukung oleh mitra pembangunan dan perusahaan melalui *Siak-Pelalawan Landscape Program* (SPLP).

## Memperkuat Visi Kelapa Sawit Berkelanjutan dan RAD KSB Melalui Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi (TTM)

Teori perubahan (*theory of change*/ToC), teori tindakan (*theory of action*/ToA), serta kerangka kerja pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation framework*/MEF) yang selanjutnya disebut sebagai TTM (ToC, ToA, dan MEF), adalah suatu alat untuk menjaring visi bersama secara partisipatif. Para pihak di Kabupaten Pelalawan memiliki visi bersama untuk **mewujudkan pengurangan deforestasi, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif** (tujuan atau dampak). Dalam lokakarya yang sudah terlaksana, para pihak merumuskan indikator pencapaian tujuan atau dampak tersebut, yakni melalui penurunan deforestasi dan peningkatan keanekaragaman hayati yang ditunjukkan dengan menurunnya persentase angka deforestasi pada

tahun 2030. Berdasarkan hasil penelitian, tim peneliti merekomendasikan indikator yang progresif dan spesifik dengan menyoar **perlindungan hutan dan nol deforestasi pada 302.819 ha dan penurunan deforestasi sebesar 80% di APL (areal penggunaan lain) yang diimbangi dengan peningkatan intensifikasi sebesar 30% untuk meningkatkan pendapatan pekebun rakyat sebesar 29%**. Kabupaten Pelalawan akan mencapai tujuan atau dampak ini melalui tiga jalur perubahan, yakni: data, kepatuhan hukum dan tata kelola; pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha yang berkelanjutan. Jalur-jalur perubahan yang telah dikembangkan juga berpeluang mendorong transformasi gender.

## Pemodelan Dampak Kebijakan Sawit Berkelanjutan Melalui JAPOS

JAPOS (*Jurisdictional Approach of Palm Oil Simulation*) adalah alat untuk memodelkan dampak skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. JAPOS dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memahami sinergi dan timbal-balik antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. JAPOS memodelkan intervensi kebijakan yang dijabarkan dalam RAD KSB. Model ini memproyeksikan masa depan sebagai dampak dari implementasi intervensi untuk mencapai kelapa sawit berkelanjutan. Pada studi ini kami mengembangkan tiga skenario yakni BAU (*business as usual*), NDP (*no deforestation and no peat*) dan kombinasi NDP dengan intensifikasi, sertifikasi, dan insentif (harga premium, pajak karbon dan transfer fiskal berbasis ekologis). Pada skenario kebijakan NDP dan kombinasi, perluasan areal perkebunan kelapa sawit turun sebesar 10% dari BAU. Skenario kebijakan ini mampu menurunkan deforestasi kumulatif hingga 100% dari BAU dan menurunkan emisi sebesar 29-35% dari BAU. Namun perlu ada mitigasi untuk penurunan jumlah volume produksi CPKO (*crude palm kernel oil*) (5-13% dari BAU) dan nilai perdagangan (5-15% dari BAU).

## Rekomendasi Kunci untuk RAD KSB Kabupaten Pelalawan

Rekomendasi kunci hasil rumusan TTM dan JAPOS dijabarkan dalam matriks yang terdiri atas lima komponen, yakni: komponen penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; komponen peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan; komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan; komponen tata kelola dan penanganan sengketa; dan komponen pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar produk-produk sawit.

Visi bersama Kabupaten Pelalawan adalah **menwujudkan pengurangan deforestasi, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif**. Dalam lokakarya yang telah terlaksana, para pihak merumuskan indikator pencapaian tujuan atau dampak tersebut, yakni melalui pengurangan deforestasi dan peningkatan keanekaragaman hayati yang ditunjukkan dengan menurunnya persentase angka deforestasi pada tahun 2030. Berdasarkan hasil penelitian, tim peneliti merekomendasikan indikator yang progresif dan spesifik dengan menyoar **perlindungan hutan dan nol deforestasi pada 302.819 ha dan penurunan deforestasi sebesar 80% di APL (areal penggunaan lain) yang diimbangi dengan peningkatan intensifikasi sebesar 30% untuk meningkatkan pendapatan pekebun rakyat sebesar 29%**.

Simulasi JAPOS menunjukkan bahwa skenario kebijakan NDP yang dikombinasikan dengan skenario intensifikasi, sertifikasi, dan berbagai skema insentif dan disinsentif mampu menurunkan deforestasi kumulatif sebesar 7,3 ribu ha (100% dari BAU) dan emisi tahunan sebesar 1,4 juta ton CO<sub>2</sub> (35% dari BAU). Meskipun implementasi skenario ini akan berdampak pada penurunan produksi CPKO (*crude palm kernel oil*) dan nilai perdagangan kelapa sawit, hal ini dapat diatasi dengan melakukan peningkatan intensifikasi dan insentif di masing-masing skenario kebijakan sehingga terjadi keseimbangan antara faktor ekonomi dan lingkungan untuk mencapai sawit berkelanjutan.

### CIFOR-ICRAF

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) memanfaatkan sumber daya pepohonan, hutan, dan bentang alam agroforestri untuk menghadapi tantangan terberat dunia saat ini – berkurangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesejahteraan, dan ketidaksetaraan. CIFOR dan ICRAF merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR.

